

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena konflik yang berlangsung antara pihak Ukraina dan Rusia akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat oleh seluruh dunia, sejak invasi ukraina pada 24 Februari 2022 menarik banyak perhatian Dunia Internasional. Serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina merupakan serangkaian peristiwa yang pada kenyataannya sudah berlangsung mulai November 2021 dulu, dimana terdapat sumber bukti yang ditunjukkan melalui citra satelit bahwa terdapat mobilisasi pasukan baru dari pihak Rusia yang kemudian dikumpulkan dan diletakkan pada perbatasan dekat dengan Ukraina, yang mana saat itu diikuti dengan keyakinan dari pihak Barat dengan jumlah sebesar 100.000 pasukan militer yang dilengkapi dengan tank dan berbagai perangkat militer yang lain. Keyakinan pihak Barat pun disusul dengan dugaan bahwa pihak Rusia akan melakukan penyerangan terhadap Ukraina, akan tetapi hal tersebut langsung menyangkal. Rusia melakukan pelatihan militer dalam skala besar di Belarusia hingga menghadirkan kembalinya isu penyerangan tersebut. Hingga 15 Februari, Presiden Rusia Putin mendeklarasikan dalam konferensi pers yang ditemani bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz bahwa Rusia tidak ingin berperang sehingga akan menarik pasukan Moskow yang ada pada perbatasan Ukraina. Kemudian, Putin mengatakan bahwa Rusia akan berupaya untuk menemukan solusi dengan Barat dan akan menjalin kerjasama berkelanjutan melalui jalur

negosiasi. Hal tersebut diungkapkan Putin yang dimuat dalam AFP (Sefti, 2022). Pihak Barat meragukan pernyataan tersebut hingga intelijen organisasi internasional yaitu NATO yang berada di Eropa Timur mengungkapkan bahwa sikap dari Rusia akan tetap menyerang wilayah timur dari Ukraina yang menjadi wilayah pemberontak, meskipun penyerangan itu terbatas. Pada Kamis (24 Februari 2022) Pernyataan Putin bahwa Rusia tidak menginginkan perang tidak terealisasi, serangan benar dilakukan, Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina termasuk Kyiv. Tindakan Putin membuat Barat geram Para ahli percaya Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa perubahan di Ukraina. Rusia, ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro Moskow (Sefti, 2022).

Konflik Ukraina dan Rusia adalah konflik yang Panjang, jika kita melihat sejarah kedua negara tersebut secara hubungan memiliki sejarah masa lalu yang saling terikat. Ukraina dan Rusia memiliki nenek moyang yang sama yaitu Keivan Rus/Kiyvan dan Kyiv ibukota dari Ukraina dijuluki sebagai kota dari Rusia yang menjadi induk dengan sebutan “the mother of Russian cities”, yang mana pada waktu itu kedudukannya setara antara Kyiv dengan Moscow serta St. Petersburg. Kemudian, dibawahnya ajaran agama Kristen pada abad ke-8 hingga ke-9 oleh kerajaan Byzantine yang akan disebarluaskan kepada masyarakat Slavia yang ada di Kyiv, yang akhirnya menjadi titik awal bagi masyarakat Keivan Rus yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai etnik Rusia, Belarusia, dan Ukraina saat ini (Masters, 2022).

Pada abad ke 10 Keivan Rus menyatukan suku suku dari beragam etnis yang berada dibawah gereja kerajaan Byzantine namun mulai runtuh sejak invasi mongol pada abad 13 yang membuat sejarah Ukraina dan Rusia terpisah. Rusia pada akhirnya berubah dengan julukan Rusain State, dimana Ukraina pun ikut berubah dengan julukan The Grand Duchy of Lithuania yang mana lebih didominasi pada keturunan lituhania. Hingga Ukraina perlahan dikuasai oleh Kekaisaran dari Rusia dalam perang yang terjadi dengan Polish-Lithuanian; dimana menghasilkan pembagian wilayah Ukraina yang terpecah menjadi dua, yaitu wilayah yang dikuasai Rusia yang terletak di “Left Bank” dan yang dikuasai Polandia yang terletak di Right Bank” (Conant, 2022).

Seiring berjalannya waktu dan konflik, pada 1991 beberapa bulan setelah Uni soviet bubar Ukraina menyatakan kemerdekaannya. Pada waktu itu Ukraina yang dipimpin oleh Leonid Kravachuk sebagai presiden pertama, Ukraina pada masa Kravachuk bisa dikatakan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Rusia dapat dilihat pada tahun 1992 kedua negara mulai membangun hubungan diplomatik, Ukraina dan Rusia sepakat untuk membuat *Commonwealth of Independent States (CIS)*(Iswardhana, 2022). Namun kerukunan ini pun tidak bertahan lama, yang mana terjadi pada awal masuknya 2000-an yang ditandai dengan hadirnya ketegangan oleh negara-negara yang berada disekitar wilayah Rusia, yang mana konflik Perang Yugoslavia salah satunya sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kemungkinan hadirnya konflik Krimea antara Rusia dengan Ukraina. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Council on Foreign Relations yang memuat hasil laporan pada 2009 yang kemudian terbit, dimana

isinya menegaskan akan terdapat kemungkinan Skenario yang dilakukan pihak Rusia untuk melakukan intervensi di wilayah Krimea dengan berdalih untuk memberikan perlindungan karena berasal sama dari Rusia, yang mana diduga suku bangsa dari Tata Krimea akan mendukung hal tersebut (Chairunnisa & Firyal Athaaya, 2022).

Viktor Yanukovich dinyatakan sebagai presiden pada 2010, Viktor Yanukovich sendiri merupakan Presiden Ukraina yang Pro-Rusia, dia sangat memberikan keuntungan bagi Rusia dan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Rusia. Kebijakan kebijakan Viktor Yanukovich yang Pro-Rusia termasuk dengan tidak menandatangani perjanjian penting yaitu Association Agreement (AA), yang mana dianggap sebagai langkah awal penting untuk menjadi bagian anggota dari Uni Eropa serta diberlakukannya perjanjian Free Trade Area (FTA) yang mana penyusunannya bersama Ukraina dengan para negara anggota dari Uni Eropa (Massaguni et al., 2022). Tindakan Viktor Yanukovich tersebut menimbulkan kemarahan dari dari kelompok oposisi yang pro-Eropa dan sejak saat itu protes tak henti henti terhadap Viktor Yanukovich yang biasa dikenal dengan Revolusi Oranye hingga dilangsungkannya pemungutan suara untuk menjatuhkan Viktor Yanukovich. Paska jatuhnya kekuasaan Viktor Yanukovich Ukraina dipimpin oleh Yushchenko dengan memberikan janji sebagai pemimpin Ukraina yang akan mengundurkan diri dari orbit Kremlin dan memilih mitra baru yaitu NATO dan Uni Eropa. Kemudian hal itu membuat Rusia geram hingga konflik pun berlanjut dengan Rusia pada 2014 yang melakukan aneksasi di wilayah Krimea dan dilanjut pada 2022 dengan menginvasi sepenuhnya Ukraina.

Invasi Rusia ke Ukraina tidak terlepas dari sentimen aktor-aktor politik Rusia terutama Vladimir Putin yang menjadi Presiden Rusia hingga kini. Putin cukup keras memberikan pernyataan kepada Ukraina bahwa terdapatnya kepemilikan entitas yang sama dengan Rusia. Berdasarkan siaran stasiun televisi pada 2021 lalu dalam sebuah acara politik tahunan yang berjudul *Direct Line*, didapati sesi tanya jawab bersama Vladimir Putin yang menjadi Presiden Rusia yang menyatakan antara Rusia dengan Ukraina merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kemudian Putin melanjutkan dengan menyebut pihak dari pemerintah modern Ukraina yang menunjukkan sikap tidak ramah yang didukung beberapa faktor seperti adanya perumusan undang-undang yang dirancang oleh pemerintahan Ukraina terkait etnis Rusia yang bukan termasuk bagian Ukraina pribumi (Kremlin, 2021). Berdasarkan pandangan Putin, sudah berabad-abad etnis Rusia yang menempati di wilayah Ukraina sehingga hal tersebut tidak masuk akal terkait tidak menjadi pribumi Ukraina.

Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia dalam bidang militer dianggap sudah bertindak kejahatan sejak pasca Perang Dunia II yang termasuk ke dalam golongan paling buruk. Beliau menyatakan hal tersebut dan dibawa ke dewan keamanan dalam organisasi internasional PBB bahwa telah terjadi aksi pembunuhan oleh warga sipil, dimana tank dari pihak Rusia menghancurkan wilayahnya demi “kesenangan” semata. Kemudian, hal ini meminta tanggungjawab kepada mereka agar dapat diadili yang disebabkan hadirnya Nazi di wilayah Nuremberg. Gambar-gambar tubuh yang mengerikan tersebut menyebabkan timbulnya kecaman oleh warga dunia

karena banyak yang tergeletak begitu saja di berbagai kota seperti Bucha. Kemudian, setelah pidato tersebut ditaut berbentuk video yang dikirimkan ke Dewan Keamanan, dimana Zelensky menunjukkan keadaan masyarakat Ukraina yang tewas, terbakar, bahkan cacat dalam bentuk video grafis dan gambar. Ditambahkan bahwa para militer dari pihak Rusia sengaja melakukan pembunuhan bagi siapapun yang mengabdikan kepada pemerintahan berdasarkan argumennya. Kemudian ditambahkan pembunuhan hingga pembakaran mayat tersebut dilakukan menyeluruh, dari mulai orang dewasa hingga anak-anak (BBC, 2022).

Perang yang masih berjalan hingga saat ini cukup banyak memakan banyak korban meskipun belum ada data resmi mengenai jumlah korban dari perang ini namun dokumen-dokumen rahasia milik Amerika Serikat bocor salah satunya mengenai perang Ukraina-Rusia tentang korban yang diderita di kedua sisi. Pejabat pentagon telah mengkonfirmasi mengatakan bahwa dokumen itu nyata. Selanjutnya, terdapat dugaan pihak AS yang menyatakan tentara Rusia yang dibunuh atau luka-luka sekitar 189.500 hingga 223.000 tentara.

Ukraina didapati mencapai angka kerugian yang setara dalam rentang 124,500-131.000, yang mana angka ini merupakan rata-rata yang kemudian pada beberapa pekan lalu disampaikan kepada para wartawan (BBC, 2023),

Beberapa negara termasuk Ukraina dan Rusia mempertanyakan kebenarannya namun pejabat AS mengatakan beberapa file tampaknya telah diubah. Dampak dari konflik Ukraina-Rusia tidak hanya dirasakan oleh kedua negara yang sedang berkonflik namun juga dirasakan oleh dunia internasional,

dampak yang paling terasa adalah ancaman krisis energi dan pangan yang telah dirasakan oleh banyak negara di dunia. Berbagai sanksi yang diterima oleh Rusia dari barat telah membuat dipangkasnya pasokan terhadap bidang gas di beberapa negara bagian Uni Eropa yang dilakukan Rusia dengan mencapai hingga 60 persen, dimana serta implikasi dari sanksi sanksi barat juga telah menyebabkan naiknya harga minyak mentah dunia sebesar 350 persen hanya dalam kurun waktu 2 tahun (Context, 2022). Dilihat dokumen AS yang bocor Rusia memiliki jumlah korban dan kerugian lebih banyak dari Ukraina walaupun secara anggaran dan kekuatan militer Rusia lebih unggul dari Ukraina, dimana anggaran dalam bidang pertahanan pada pihak Rusia setiap tahunnya mencapai angka lebih dari US\$60 miliar atau setara dengan Rp869,5 triliun. Di lain sisi, pengeluaran anggaran yang dikeluarkan pihak Ukraina hanya berada pada US\$4 miliar atau setara dengan Rp57,4 miliar. Dengan kondisi tersebut, dalam berbagai kesempatan, kekuatan militer yang dimiliki Rusia dibanggakan oleh berbagai pihak. Vladimir Putin yang menjadi presiden menetapkan adanya modernisasi militer yang menjadi program ambisius agar kekuatannya dlebih-lebihkan (Beale, 2022).

Secara jumlah dari Rusia, pasukan militernya mencapai 280.000 personel dengan jumlah keseluruhan terhadap personel bersenjata gabungan hingga 900.000, sedangkan alat senjata berupa tank berjumlah 2.840 yang mana jumlah ini melebihi dari kekuatan Ukraina yang berbanding tiga dan satu. Berdasarkan pernyataan yang dimuat oleh institut Internasional berbasis di London terkait dengan Studi Strategis (VOA Indonesia, 2022).Meskipun secara angka pasukan Rusia jauh lebih unggul dibandingkan dengan pihak Ukraina, akan tetapi telah

memiliki pengalaman tempur oleh pasukan militer di Ukraina dalam wilayah Donbas dan sekitar bagian timur negara tersebut. Kemudian, diperangi wilayah separatis yang wilayahnya mendapat dukungan dari Rusia pada 2014. Adanya pembentukan pertahanan melalui jalur udara pada jarak pendek serta penguatan senjata anti-tank seperti rudal Javelin yang berasal dari pasukan AS dapat berkontribusi menghambat kemajuan Rusia. Selanjutnya, Rusia pun diuntungkan dengan adanya bantuan Alutsista dari barat seperti Amerika, Turki, Inggris, Estonia, serta Jerman.

Konflik ini pun menunjukkan bahwa teknologi dan taktik yang unggul telah menghasilkan perubahan dan pembaharuan di bidang militer baik dari segi taktik, pasukan maupun alutsista yang akan mendominasi peperangan modern. Tidak bisa dipungkiri berubah seperti itu sangat penting saat ini, peningkatan pasukan, taktik dikombinasikan dengan teknologi perang telah mengubah wajah peperangan konvensional bahwa teknologi dan taktik yang unggul telah menghasilkan perubahan dan pembaharuan di bidang militer baik dari segi pasukan maupun alutsista yang akan mendominasi peperangan modern salah satu yang paling mencolok dan cukup menarik adalah adanya pemanfaatan dalam menggunakan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau yang dikenal dengan sebutan pesawat tanpa adanya awak. BBC dalam artikelnya menyebutkan bahwa kita berada di era peperangan baru. UAV sendiri merupakan bentuk pesawat yang secara otomatis dikendalikan melalui komputer dari program rancangan, kemudian dikendalikan dari jarak yang jauh oleh pilot yang berada di kendaraan lainnya. Umumnya dikenal khalayak umum digunakan untuk kebutuhan dalam

industri kreatif yang berhubungan dengan fotografi dan pembuatan film namun jika kita melihat bagaimana awal mula pesawat tanpa awak diciptakan untuk adalah untuk difungsikan sebagai alat pengawasan dalam militer (Noor, 2020).

Ide pesawat tanpa awak sebagai teknologi militer sendiri sebenarnya sudah ada sejak Perang Dunia Pertama, selama Perang Dunia Pertama Britain's Aerial Target, pesawat kecil yang dikendalikan radio dikembangkan di Inggris dan Amerika Serikat kemudian pertama kali diuji pada Maret 1917 sementara torpedo udara Amerika yang dikenal sebagai Kattering Bug pertama kali dicoba pada 1918. Meskipun uji coba keduanya cukup meyakinkan namun tidak ada yang digunakan langsung selama perang. Selama Perang Dunia Pertama, pengembangan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) terus berlanjut. Inggris memproduksi sejumlah pesawat yang dikendalikan radio yang dipergunakan sebagai target untuk latihan pada tahun 1935 dan kemudian istilah 'Drone' mulai digunakan yang terinspirasi dari nama salah satu tipe, yaitu DH.82B Queen Bee (Tuan C, 2019).

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) muncul dan digunakan dalam skala besar pada saat peperangan Vietnam pada tahun 1960-an dan 70-an. Penggunaannya tidak hanya digunakan sebagai alat pengintai melainkan penggunaannya berkembang menjadi umpan dalam pertempuran, meluncurkan misil ke sasaran tetap, dan menjatuhkan selebaran untuk propaganda. Drone subsonik Ryan Aeronautical Model 147 Lightning Bug, andalan perang udara Vietnam, diluncurkan di udara dari pesawat induk DC-130, menavigasi disepanjang pos pemeriksaan yang telah diprogram sambil mengambil foto dan

diakhir misinya, mengeluarkan parasut dan melayang ke arah tanah. Sebuah helikopter mendengung untuk mengambilnya. Model 147, tidak dapat diandalkan, dan rentan terhadap pertahanan udara dan spionase musuh. Pada tahun 1967 Vietnam Utara mulai mencegat sinyal radio operator pesawat tak berawak dan mengeksploitasi intelijen yang dihasilkan untuk melakukan penyerangan udara untuk pesawat tak berawak dan pesawat tempur berawak. Kerugian yang melonjak memaksa Angkatan Udara dan Badan Keamanan Nasional untuk melengkapi kapal induk dengan enkripsi radio baru. Lightning Bug berevolusi pada akhir perang, Model 147 lebih efektif, lebih andal, dan lebih dapat bertahan daripada model awal. Dengan itu mengilhami desain drone yang benar-benar baru yang semakin meningkatkan konsep dasar pengintaian udara tak berawak (Axe, 2021). Setelah Saigon jatuh kepada tangan Vietnam Utara pada tahun 1975, muncullah satelit yang lebih mampu dan andal membuat drone pada saat itu menjadi teknologi yang usang namun kemudian sejarah mulai berputar kembali, perkembangan teknologi pada 1990-an membuat pengembangan generasi baru UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Kemudian penggunaan UAV dalam militer mulai kembali menjadi perbincangan hangat setelah Amerika Serikat sering menggunakan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) sebagai agenda counterterrorismnya, termasuk yang baru baru ini terjadi yaitu peristiwa terbunuhnya seorang pemimpin al-Qaeda yang bernama Ayman al-Zawahiri. Joe Biden sebagai presiden melakukan konfirmasi kebenaran tersebut. Senin mengumumkan terkait informasi tewasnya Ayman al-Zawahiri sebagai pemimpin dari al-Qaeda akibat dari serangan yang

terjadi oleh pesawat yang tidak memiliki awak AS di wilayah Kabul, dimana operasi tersebut memberikan dampak sehingga terjadinya penewasan akibat dari serangan pesawat yang tidak dimiliki oleh AS yang berada di Kabul, dimana operasi tersebut membawa kehadiran keadilan dan diharapkan “satu lagi tindakan penutupan” untuk keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa serangan September 2001 lalu di Amerika Serikat (Lee et al., 2022). Namun CIA atau Gedung Putih tidak menjelaskan jenis UAV (Unmanned Aerial Vehicle) yang digunakan dalam penyerangan tersebut tetapi para ahli mengatakan Reaper paling masuk akal mengingat daya tahan dan kemampuan senjatanya. “CIA-lah yang mungkin melakukan serangan dan mereka menerbangkan drone MQ-9 Reaper seperti yang dilakukan Angkatan Udara,” menurut Stacie Pettyjohn, direktur Program Pertahanan di Center for a New American Security, dalam sebuah wawancara (Buchaniec, 2022).

Pada konflik Ukraina-Rusia UAV (Unmanned Aerial Vehicle) memiliki peran penting, dalam konflik yang sangat Panjang ini kedua negara menggunakan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dengan berbagai tujuan seperti pengawasan dan pengintaian, penargetan, dan pemboman bahkan rekaman video yang bisa menjadi sumber propaganda. UAV militer yang menjadi pesawat tanpa awak yang utamanya dari pihak Ukraina yang dibuat dari Turki yaitu Bayraktar TB2. Pesawat nirawak ini memiliki ukuran kecil yang didalamnya terdapat kamera dan alat senjata berupa bom dengan panduan bentuk laser. Kemudian, Rusia menggunakan Orlan-10 sebagai UAV yang utamanya. UAV kedua belah pihak cukup efektif dalam ditemukannya target yang menjadi musuh dan adanya

panduan terkait tembakan artileri yang dilakukan. Selang beberapa minggu dari peristiwa perang Bayraktar, pihak Ukraina mendapati berbagai pujian akibat ditunjukkannya bagaimana posisi menyerang menuju target layaknya amunisi gudang dan berkontribusi pada peristiwa kapal perang yaitu Moskva yang tenggelam, menurut Dr. Miron. Namun karena Bayraktar terlalu besar sehingga pergerakannya lambat dan hanya bisa terbang di ketinggian sedang menjadi mudah untuk dijatuhkan oleh system pertahanan udara Rusia. Orlan 10 milik Rusia pun tidak mau kalah dimana pasukan dari pihak Rusia didapati perlengkapan senjata guna menyerang target dari musuhnya dengan memakan waktu mulai dari tiga sampai lima menit. Setelah senjata dari Orlan-10 sudah mengunci targetnya jika tidak menggunakan UAV bisa memakan waktu sekitar 20-30 menitan (BBC, 2022). Tidak hanya Orlan-10 dan Bayraktar yang digunakan dalam perang ini melainkan ada Shaded-136 pesawat buatan Iran yang digunakan Rusia, Switchblade yang dipasok Amerika Serikat kepada Ukraina selain UAV Militer dalam konflik ini pun terdapat UAV Komersial Pihak yang terlibat dari perang dimana utamanya yaitu Ukraina menyatakan seringnya penggunaan dari model berbentuk drone komersial yang ukurannya kecil dan relatif murah yang mirip dengan DJI Mavic 3, dimana sekitar harga £1.700 (BBC, 2023).

Dalam konflik Ukraina-Rusia kita dapat menyaksikan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) memiliki peran yang semakin penting dalam peperangan, namun tantangan dalam penggunaan drone dalam operasi keamanan nasional meliputi masalah teknis seperti interoperabilitas dan keamanan jaringan, serta masalah hukum dan etika seperti privasi dan kebebasan sipil.

Dalam melakukan kajian dan analisis berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka adanya penelitian yang dilakukan bermaksud guna menjelaskan Modernisasi Militer: Penggunaan UAV (Unmannend Aerial Vehicle) dalam Konflik Ukraina-Rusia.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang yang sudah diuraikan penulis, maka rumusan masalah yang hendak dicapai berdasarkan penelitian ini merupakan: **“Bagaimana moderenisasi teknologi militer, penggunaan UAV/Unmanned Aerial Vehicle dalam konflik Ukraina-Rusia 2022?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak keluar konteks dari apa yang ingin dibahas dalam penelitian ini maka penulis memfokuskan kepada bagaimana konflik Ukraina dan Rusia terjadi serta penggunaan teknologi militer UAV/Unmanned Aerial Vehicle dalam konflik Ukraina-Rusia yang dimulai pada Februari 2022 hingga Mei 2023 dimana Ukraina melakukan serangan UAV berskala besar untuk yang pertama kalinya dalam perang yang telah berlangsung selama 15 bulan di Ukraina.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penulis menginginkan penulisan memiliki beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian yang nantinya hendak untuk dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan teknologi militer terhadap perang Ukraina-Rusia 2022).

2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknologi militer UAV/Unmanned Aerial Vehicle di konflik Ukraina-Rusia 2022.
3. Untuk mengetahui peran penggunaan UAV dalam konflik Ukraina-Rusia 2022

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan terhadap tujuan penelitian yang diuraikan oleh penulis, terdapat kegunaan dalam tulisan ini yang dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, dimana penulis berharap melalui adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan wawasan secara teoritis terkait Penggunaan teknologi militer UAV/Unmanned Aerial Vehicle dalam konflik Ukraina-Rusia
2. Kegunaan praktis yang ingin dicapai penelitian ini, yaitu :
 - a. Sebagai syarat guna menyelesaikan salah satu tanggung jawab selama menempuh program studi S1 melalui pembuatan karya ilmiah yang dijadikan sebagai syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan.
 - b. Memberikan kebergunaan baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat luas dan para akademisi secara umum terlebih bagi penulis secara khusus; dan
 - c. Dengan khusus berkontribusi untuk memberikan informasi ke pihak lainnya yang memiliki ketertarikan minat dalam meneliti permasalahan yang diangkat yang sesuai dengan penelitian ini serta dapat dijadikan

sebagai referensi dan pengembangan bagi pihak lainnya yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi militer UAV/Unmanned Aerial Vehicle dalam konflik.